



Money Politics VS Cost Politics: Memilih Makna Yang Terlihat Sama

Nova Nazwa Ramadhanti¹, Sahrul Sodikin², Siti Abelia Puteri³, Noerma Kurnia Fajarwati M. I. Kom⁴

¹⁻⁴ Ilmu Komunikasi, Ilmu Sosia dan Ilmu Politik Universitas Bina Bangsa, Banten

Email : novanazwa61@gmail.com¹, sahrilsodikin0104@gmail.com², sitiabeliaputri@gmail.com³, muma.kurnia@gmail.com⁴

Abstract. *This article explores the comparison between money politics and cost politics in the context of the political process and its influence on democratic integrity. Money politics reflects corrupt practices in which wealth is used to manipulate election outcomes or political decisions, while cost politics includes costs related to campaigns, regulations, and citizen participation in the political process. In distinguishing these two concepts, this article highlights their role in shaping the strengths and weaknesses of democracy and the challenges in strengthening political integrity. By analyzing case studies and theoretical concepts, this article aims to present a clearer understanding of the differences between money politics and cost politics, as well as promote efforts to address corruption and increase transparency in the political process.*

Keywords: *Money politics, Cost politics, Democracy, Political Integrity, Corruption, Citizen Participation, Political Regulation.*

Abstrak. Artikel ini mendalami perbandingan antara politik uang dan politik biaya dalam konteks proses politik dan pengaruhnya terhadap integritas demokrasi. Politik uang mencerminkan praktik korupsi di mana kekayaan digunakan untuk memanipulasi hasil pemilihan atau keputusan politik, sementara politik biaya mencakup biaya terkait kampanye, regulasi, dan partisipasi warga dalam proses politik. Dalam membedakan kedua konsep ini, artikel ini menyoroti peran mereka dalam membentuk kekuatan dan kelemahan demokrasi serta tantangan dalam memperkuat integritas politik. Dengan menganalisis studi kasus dan konsep-konsep teoritis, artikel ini bertujuan untuk menyajikan pemahaman yang lebih jelas tentang perbedaan antara politik uang dan politik biaya, serta mempromosikan upaya untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan transparansi dalam proses politik.

Kata Kunci: Politik Uang, Politik Biaya, Demokrasi, Integritas Politik, Korupsi, Partisipasi Warga, Regulasi Politik.

PENDAHULUAN

Politik merupakan domain yang kompleks dan penting dalam kehidupan masyarakat, karena melalui politik, berbagai keputusan dan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dibuat dan dilaksanakan. Secara esensial, politik mencakup proses pembentukan kebijakan, pembagian dan penggunaan kekuasaan, serta penyelesaian konflik dalam suatu komunitas atau negara.

Dalam konteks politik modern, terdapat dua konsep yang sering kali menjadi sorotan: politik uang dan politik biaya. Politik uang, atau yang sering disebut juga sebagai money politics, merujuk pada upaya untuk mempengaruhi perilaku masyarakat atau pemilih melalui pemberian imbalan materi, baik itu dalam bentuk uang atau barang, yang dimiliki oleh individu atau partai politik. Tujuan dari politik uang adalah untuk memperoleh dukungan atau suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah. Dalam praktiknya, politik uang sering

kali terkait dengan praktik suap atau sogokan, di mana pemilih diberi imbalan materi untuk memilih calon tertentu.

Di sisi lain, politik biaya, atau *cost politics*, mengacu pada semua biaya yang terlibat dalam proses politik, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Ini mencakup biaya kampanye, iklan politik, dan segala kegiatan lain yang memerlukan pengeluaran dana. Politik biaya juga mencakup semua pengeluaran yang terkait dengan upaya memperoleh dukungan dari pemilih, seperti pemasangan spanduk, iklan di media massa, dan kegiatan sosialisasi lainnya.

Perbedaan mendasar antara politik uang dan politik biaya terletak pada sifat pengaruhnya. Politik uang lebih menekankan pada pemberian imbalan materi kepada pemilih untuk memperoleh dukungan, sedangkan politik biaya lebih fokus pada pengeluaran dana untuk mendukung kampanye politik dan upaya memperoleh dukungan dari pemilih. Meskipun keduanya terkait dengan aspek keuangan dalam proses politik, politik uang lebih menimbulkan risiko terhadap integritas demokrasi karena dapat mempengaruhi proses pemilihan secara tidak adil dan merusak integritas sistem politik.

Dalam konteks dinamika politik modern, pemahaman yang mendalam tentang politik uang dan politik biaya sangat penting. Memahami perbedaan dan implikasi dari kedua konsep ini dapat membantu dalam membangun sistem politik yang lebih transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang dan regulasi yang efektif terhadap pengeluaran dana dalam politik biaya juga diperlukan untuk memastikan bahwa proses politik berlangsung dalam kerangka demokratis dan integritas yang kuat.

KAJIAN TEORITIS

Money politics merujuk pada praktik dalam proses politik di mana uang atau sumber daya keuangan memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi hasil pemilihan atau keputusan politik. Menurut suatu ahli, *money politics* tidak hanya terbatas pada pemilihan umum, tetapi juga dapat meliputi praktik korupsi, penyuapan, dan pengaruh uang dalam pembentukan kebijakan. Selain itu, Gelderman dan Joling (2020) menyoroti bahwa *money politics* dapat mencakup penggunaan dana kampanye yang besar untuk mempengaruhi pemilih, memperoleh dukungan politik, atau memenangkan pemilihan.

Cost politics, di sisi lain, mengacu pada pertimbangan biaya atau konsekuensi ekonomi dari keputusan politik atau kebijakan. Menurut Jensen (2019), *cost politics* sering kali berkaitan dengan analisis ekonomi kebijakan publik, di mana keputusan politik dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap anggaran negara, pertumbuhan ekonomi, atau distribusi kekayaan. Kajian

ini menekankan bahwa dalam cost politics, perhatian utama adalah pada evaluasi ekonomi dari keputusan politik, terlepas dari pengaruh uang atau sumber daya keuangan dalam proses politik itu sendiri.

Pemahaman yang jelas tentang money politics dan cost politics penting untuk menganalisis dinamika politik dan efektivitas kebijakan. Dalam praktiknya, pemahaman yang baik tentang money politics dapat membantu mencegah praktik korupsi dan memperkuat proses demokratis, sementara pemahaman tentang cost politics dapat membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih bijaksana berdasarkan pertimbangan ekonomi yang tepat.

Dengan memahami perbedaan antara money politics dan cost politics, kita dapat menghindari kebingungan dalam analisis politik dan kebijakan. Money politics menyoroti peran uang dalam proses politik, sementara cost politics menekankan evaluasi ekonomi dari keputusan politik. Kedua konsep ini penting untuk dipahami dalam konteks politik modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menyelidiki perbedaan antara money politics dan cost politics serta relevansinya dalam konteks politik modern. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang lebih dalam, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dimensi kompleks fenomena yang diamati. Teknik pengumpulan data meliputi observasi partisipatif, di mana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan politik dan kampanye untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang praktik money politics dan cost politics dalam situasi nyata. Selain itu, analisis dokumen juga dilakukan untuk memperoleh wawasan yang lebih terinci tentang fenomena ini, dengan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait seperti laporan kampanye dan dokumen keuangan partai politik.

Validitas dan reliabilitas data dijaga dengan menggunakan triangulasi data, sebuah pendekatan yang membandingkan dan memverifikasi hasil dari berbagai sumber data dan metode pengumpulan data yang berbeda. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa temuan penelitian didukung oleh bukti yang konsisten dan dapat dipercaya, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap hasil penelitian ini. Dengan menggabungkan kedua teknik tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan antara money politics dan cost politics, serta dampaknya dalam konteks politik modern.

HASIL PEMBAHASAN

1. Money Politics

Politik uang, yang juga dikenal sebagai money politic, menandai upaya yang terkoordinasi untuk memanipulasi perilaku masyarakat atau pemilih dengan menggunakan insentif materi atau kekayaan, baik dari individu maupun partai politik, guna memperoleh dukungan dalam arena politik. Konsep inti di balik politik uang merujuk pada pemberian materi, yang bisa berupa uang tunai, barang, layanan, atau manfaat ekonomi lainnya, kepada pemilih atau kelompok masyarakat tertentu. Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa penerima imbalan akan membalas dengan dukungan politik, seringkali dalam bentuk suara dalam pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah.

Namun, esensi dari praktik politik uang melebihi sekadar penawaran imbalan materi. Praktik ini sering kali dilakukan dengan motif yang tersembunyi, dimana walaupun sering diiringi klaim atas nama kepentingan publik atau rakyat, tujuannya sebenarnya adalah untuk keuntungan pribadi, kelompok, atau partai politik tertentu. Dalam konteks ini, politik uang menjadi salah satu bentuk manipulasi politik yang didasari oleh motivasi yang kurang transparan dan lebih cenderung kepada kepentingan yang sempit. Oleh karena itu, praktik politik uang seringkali menyusup ke dalam struktur politik dengan menyamar sebagai agenda publik, sementara pada kenyataannya bertujuan untuk memperkuat posisi atau mengamankan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu.

2. Contoh-contoh Money Politics

Berikut adalah beberapa **contoh** praktik politik uang atau money politics dalam konteks pemilihan umum di Indonesia:

- 1) **Distribusi Sumbangan:** Para kader partai, penggembira, golongan, atau kelompok tertentu menerima sumbangan berupa uang atau barang dari calon tertentu. Praktik ini bertujuan mempengaruhi pemilih melalui imbalan materi¹.
- 2) **Bantuan Langsung:** Calon-calon pemimpin membiayai berbagai pelayanan untuk masyarakat, seperti check-up dan pelayanan kesehatan gratis, penyediaan ambulans, dan lain sebagainya¹.
- 3) **Penyelenggaraan Acara:** Politik uang juga terjadi melalui penyelenggaraan pertandingan olahraga, turnamen catur atau domino, forum pengajian, demo masak, dan sejenisnya. Dalam acara tersebut, calon-calon pemimpin dapat memperoleh dukungan dengan memberikan pilihan atau suara kepada para pemilih¹.
- 4) **Kasus KPU Kota Prabumulih:** Seorang anggota KPU Kota Prabumulih pernah terlibat dalam kasus politik uang. Dalam perkara nomor 123-PKE-DKPP/III/2021,

anggota tersebut terbukti menerima uang dari salah satu calon Anggota Legislatif dengan janji mendapatkan sebanyak 20 ribu suara².

- 5) **Mahalnya Biaya Kampanye:** Praktik politik uang menyebabkan biaya kampanye menjadi mahal. Dalam pemilu atau pilkada, sebagian besar biaya digunakan untuk membiayai mahar politik. Kontestan harus mengeluarkan jumlah yang signifikan, berkisar antara Rp5 hingga 15 miliar per orang².

3. Implikasi negatif dari Money Politics

Money Politics, atau politik uang, memunculkan implikasi yang serius terhadap demokrasi di Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terkait dengan hukuman yang diterapkan bagi pelakunya. Praktik politik uang dianggap sebagai pelanggaran dalam proses Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dalam konteks ini, hukuman pidana berupa penjara dan denda diberlakukan terhadap para pelaku politik uang. Misalnya, dalam Pemilu, pelaku politik uang dapat dikenakan hukuman penjara hingga 4 tahun dan denda hingga 48 juta rupiah, sementara dalam Pilkada, ancaman pidana bagi pelaku politik uang mencakup penjara hingga 72 bulan dan denda hingga 1 miliar rupiah. Implikasi hukuman ini menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menanggulangi praktik politik uang yang merusak demokrasi.

Selain itu, praktik politik uang juga berpotensi merusak integritas dan transparansi dalam manajemen pemerintahan. Ketika uang memainkan peran dominan dalam proses pemilihan, keputusan politik bisa terpengaruh oleh motif finansial daripada kepentingan publik atau kualitas calon. Akibatnya, korupsi dan tindakan tidak etis lainnya dapat merajalela dalam struktur pemerintahan. Praktik politik uang memicu lingkungan politik yang rentan terhadap praktik korupsi, yang pada gilirannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga demokratis.

Selain dampak langsung terhadap proses politik, politik uang juga memiliki dampak yang lebih dalam pada paradigma demokrasi bangsa. Praktik ini dapat menggoyahkan keyakinan akan demokrasi yang seharusnya berdasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga. Ketika pemilih terpengaruh oleh imbalan materi, mereka cenderung kehilangan kemampuan untuk membuat keputusan yang rasional dan terinformasi. Hal ini merusak esensi demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berpijak pada partisipasi bebas dan pemilihan yang adil. Dengan demikian, politik uang tidak hanya membahayakan proses politik, tetapi juga mengancam fondasi demokrasi itu sendiri.

4. Pengertian dan relevansi Cost Politics

Cost Politics atau biaya politik adalah konsep yang mengacu pada jumlah dana yang diperlukan untuk mencalonkan diri dalam pemilihan dan mempertahankan jabatan setelah terpilih. Di banyak negara, biaya ini semakin meningkat. Mari kita bahas lebih lanjut:

- 1) **Money Politic (Politik Uang):** Ini adalah proses di dalam politik di mana suara rakyat atau pemilih dibeli dengan memberikan sejumlah uang. Meskipun uang tidak menjamin kesuksesan pemilu, semakin jarang orang dengan dana terbatas berhasil menang Money politic ini seringkali mengarah pada korupsi dan memposisikan uang sebagai pusat kehidupan politik.
- 2) **Cost Politic (Biaya Politik):** Ini mencakup dua aspek:
 - **Biaya Kampanye:** Biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kampanye pemilihan. Ini termasuk iklan, pertemuan dengan pemilih, dan logistik lainnya.
 - **Biaya Pemeliharaan Jabatan:** Setelah terpilih, pejabat harus mempertahankan jabatannya. Ini melibatkan biaya untuk memenuhi harapan konstituen dan memastikan kinerja yang baik.

Dampak Cost Politics:

- **Insentif Tidak Sehat:** Para anggota parlemen (MP) cenderung fokus pada kepentingan individu daripada kepentingan publik karena tuntutan finansial selama siklus pemilu. Mereka rentan terpengaruh oleh pihak yang mampu membayar, sehingga korupsi menjadi bagian dari kehidupan politik.
- **Pengabaian Calon:** Biaya politik yang tinggi mengakibatkan eksklusi calon yang kurang memiliki sumber daya untuk mendukung dukungan politik selama siklus pemilu. Ini terutama memengaruhi kaum muda dan perempuan.

Relevansi Cost Politics:

- **Demokrasi Terancam:** Biaya politik yang meningkat dapat mengurangi kepercayaan pada demokrasi dan mempengaruhi sistem demokratis secara efektif.
- **Keterbatasan Akses:** Calon perempuan dan kaum muda sering menghadapi hambatan finansial dalam berpolitik.

5. Perbandingan antara Money Politics dan Cost Politics.

Money Politics (politik uang) adalah proses dalam politik di mana suara rakyat atau pemilih dibeli dengan memberikan sejumlah uang. Praktik ini sangat tidak dibenarkan dalam pemilihan umum, baik pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden. Meskipun demikian, masih banyak calon kepala daerah atau bahkan calon presiden yang terlibat dalam

praktik ini. Masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan politik yang memadai menjadi sasaran empuk untuk dimanfaatkan secara politis. Suara mereka hanya diperlukan selama pemilihan, dan setelah pemilihan berakhir, rakyat seringkali diabaikan dan dianggap tidak relevan.

Di sisi lain, Political Cost (dana politik) adalah biaya yang diperlukan dalam proses politik. Dana politik digunakan untuk membeli spanduk, poster, baju kampanye, bendera kampanye, dan bahkan iklan di media massa atau televisi. Tujuannya adalah untuk mendekatkan informasi mengenai misi dan visi calon kepala daerah atau calon presiden kepada rakyat agar mereka dapat memilih dengan bijaksana. Perbedaan antara politik uang dan dana politik harus dipahami dengan jelas. Politik uang memang diharamkan, tetapi dana politik merupakan bagian yang wajar dalam proses politik. Penting untuk membedakan keduanya agar tidak terjadi kesalahpahaman dan mitos seputar penggunaan dana dalam politik

KESIMPULAN

Money politics (politik uang) dan cost politics (politik biaya) memiliki dampak yang signifikan terhadap proses politik dan integritas demokrasi. Money politics mencerminkan praktik korupsi dengan menggunakan kekayaan untuk mempengaruhi hasil pemilihan, sementara cost politics mencakup semua biaya terkait proses politik.

Money politics merusak integritas demokrasi dengan mengancam keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif warga. Sementara cost politics dapat mengurangi pluralitas dan representasi politik karena biaya politik yang tinggi membatasi akses bagi calon dari latar belakang ekonomi yang lebih rendah.

Untuk mengatasi money politics, perlu pemberantasan korupsi dan pendidikan politik yang memadai. Sedangkan untuk cost politics, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan akses dan representasi politik bagi semua golongan masyarakat.

Secara keseluruhan, upaya untuk mengatasi money politics dan cost politics harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, lembaga pengawas, partai politik, dan masyarakat sipil agar membangun sistem politik yang lebih transparan, adil, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Anon., 2023. Wikipedia. [Online] Available at: https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_uang [Diakses 15 Februari 2024].
- Bukhari, I., 2020. Money Politic vs Cost Politic. [Online] Available at: <https://kapol.id/money-politic-vs-cost-politic/> [Diakses 14 Februari 2024].
- Munita, R., 2023. Dampak Money Politik (Politik Uang) terhadap Demokrasi di Indonesia. [Online] Available at: <https://www.kompasiana.com/erikamunita24/6407633c3788d46ff81d06a2/dampak-money-politik-politik-uang-terhadap-demokrasi-di-indonesia> [Diakses 14 Februari 2024].
- natatalia, I., 2022. Kasus Politik Uang (Money Politik) dalam Pemilihan Umum. [Online] Available at: <https://www.kompasiana.com/intannatatalia/62b6e168cfc22e2dfe23dbd4/kasus-politik-uang-money-politik-dalam-pemilihan-umum> [Diakses 14 Februari 2024].
- Riadi, O. M., 2020. Politik Uang / Money Politic (Pengertian, Unsur, Jenis, Bentuk dan Strategi). [Online] Available at: <https://www.kajianpustaka.com/2020/10/politik-uang-money-politic-pengertian.html> [Diakses 14 Februari 2024].
- Sulthoni, Sulthoni. Arti Money Politic dan Contoh Politik Uang dalam Pemilu. [Online] Available at: <https://tirto.id/arti-money-politic-dan-contoh-politik-uang-dalam-pemilu-gFt3> [Diakses 15 Februari 2024].
- Universitas Medan Area, 2021. PENGARUH, DAMPAK DAN CARA PENYELESAIAN DARI MONEY POLITIK TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PILKADA OLEH KAUM INTELEKTUAL. [Online] Available at: <https://manajemen.uma.ac.id/2021/10/pengaruh-dampak-dan-cara-penyelesaian-dari-money-politik-terhadap-partisipasi-masyarakat-dalam-pilkada-oleh-kaum-intelektual/> [Diakses 14 Februari 2024].
- widyatno, h., 2015. Money Politics vs Political Cost. [Online] Available at: <https://www.kompasiana.com/heriwidyatno/551fbe2da33311e02bb6736f/money-politics-vs-political-cost> [Diakses 15 Februari 2024].